

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 2 TAHUN 1998 (2/1998)
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp 30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah).
- (2) Bertambahnya Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp 20.123.100.000.000,00 (dua puluh triliun seratus dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan bertambah dengan Rp 10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan

puluh satu miliar rupiah).

***10479** Pasal 2

- (1) Bertambahnya Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Penerimaan perpajakan berkurang dengan Rp 648.300.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 20.236.700.000.000,00 (dua puluh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak bertambah dengan Rp 534.700.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Bertambahnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Bantuan Program sebesar nihil;
 - b. Bantuan Proyek bertambah dengan Rp 10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp 30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (2) Bertambahnya Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 22.447.432.000.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - b. Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan Rp 8.010.426.000.000,00 (delapan triliun sepuluh miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (3) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp 2.780.574.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor bertambah dengan Rp 10.791.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Bertambahnya Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :

(dalam rupiah)

*10480	01 SEKTOR INDUSTRI	
	berkurang dengan	Rp
3.739.033.000,00		
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	bertambah dengan	Rp
14.242.557.000,00		
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	berkurang dengan	Rp
4.120.484.000,00		
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	berkurang dengan	Rp
5.346.018.000,00		
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	
	bertambah dengan	Rp
24.632.435.652.000,00		
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	berkurang dengan	Rp
8.224.544.000,00		
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	berkurang dengan	Rp
767.111.000,00		
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
	bertambah dengan	Rp
4.697.771.000,00		
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
	berkurang dengan	Rp
1.667.970.898.000,00		
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	berkurang dengan	Rp
1.525.300.000,00		
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	berkurang dengan	Rp
179.415.040.000,00		
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
	berkurang dengan	Rp
32.534.662.000,00		
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	bertambah dengan	Rp
7.953.841.000,00		

14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	Rp
	2.095.996.000,00	
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	Rp
	87.222.259.000,00	
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	Rp
	13.730.778.000,00	
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	Rp
	44.575.659.000,00	
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	Rp
	505.770.073.000,00	
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan	Rp
	660.390.694.000,00	
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan	Rp
	315.250.660.000,00	

***10481** (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	Rp
	306.201.000.000,00	
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	Rp
	515.597.000.000,00	
03	SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	Rp
	479.236.000.000,00	
04	SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	Rp
	57.182.000.000,00	
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI berkurang dengan	Rp
	34.271.000.000,00	
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	Rp
	712.172.000.000,00	

07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	berkurang dengan	Rp
302.383.000.000,00		
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	
	berkurang dengan	Rp
31.605.000.000,00		
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
	berkurang dengan	Rp
416.523.000.000,00		
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	berkurang dengan	Rp
76.730.000.000,00		
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	berkurang dengan	Rp
489.860.000.000,00		
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
	berkurang dengan	Rp
151.554.000.000,00		
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	berkurang dengan	Rp
164.929.000.000,00		
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	berkurang dengan	Rp
132.199.000.000,00		
15	SEKTOR AGAMA	
	berkurang dengan	Rp
64.442.000.000,00		
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	berkurang dengan	Rp
153.125.000.000,00		
*10482	17 SEKTOR HUKUM	
	berkurang dengan	Rp
58.323.000.000,00		
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	berkurang dengan	Rp
164.646.000.000,00		
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
	berkurang dengan	Rp
48.842.000.000,00		

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
berkurang dengan Rp
64.350.000.000,00

(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(5) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari :

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan Rp
391.077.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
bertambah dengan Rp
528.973.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
bertambah dengan Rp
971.014.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
bertambah dengan Rp
61.819.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
bertambah dengan Rp
243.048.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
bertambah dengan Rp
3.224.441.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
bertambah dengan Rp
2.393.048.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
bertambah dengan Rp
705.882.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
bertambah dengan Rp
169.994.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
bertambah dengan Rp
42.476.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,

	PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	bertambah dengan	Rp	
488.160.000.000,00			
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN		
	*10483 KELUARGA SEJAHTERA		
	bertambah dengan	Rp	
6.424.000.000,00			
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,		
	KESEHATAN, PERANAN WANITA,		
	ANAK DAN REMAJA		
	bertambah dengan	Rp	
215.233.000.000,00			
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN		
	PERMUKIMAN		
	bertambah dengan	Rp	
905.499.000.000,00			
15	SEKTOR AGAMA		
	bertambah dengan	Rp	
15.133.000.000,00			
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN		
	TEKNOLOGI		
	bertambah dengan	Rp	
88.333.000.000,00			
17	SEKTOR HUKUM		
	bertambah dengan	Rp	274.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN		
	PENGAWASAN		
	bertambah dengan	Rp	
49.537.000.000,00			
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN		
	LUAR NEGERI, PENERANGAN,		
	KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA		
	bertambah dengan	Rp	
31.578.000.000,00			
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN		
	KEAMANAN		
	bertambah dengan	Rp	
259.057.000.000,00			

- (6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang pada akhir Tahun Anggaran 1997/1998 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1998/1999.
- (2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam

miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

***10484**

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 65

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 merupakan pelaksanaan tahunkeempat Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperlukan beberapa perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 1997/1998, realisasi Pendapatan Negara diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya Pendapatan Negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan. Penerimaan Dalam Negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari *10485 rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya. Sedangkan lebih tingginya Penerimaan Pembangunan terutama berkaitan dengan adanya depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika.

Di sisi Belanja Negara, realisasi Pengeluaran Rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya Pengeluaran Rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta Pengeluaran Rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Sementara itu, realisasi Pengeluaran Pembangunan diperkirakan juga lebih tinggi dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembiayaan pembangunan yang berasal dari Bantuan Proyek.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp 30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp 30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah). Dengan demikian terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672), perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

***10486**

Huruf a

(dalam rupiah)

PENERIMAAN PERPAJAKAN

berkurang dengan 648.300.000.000,00

0110 Pajak Penghasilan (Pph)
berkurang dengan 659.517.000.000,00

0120 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
berkurang dengan 100.383.000.000,00

0140 Pajak Bumi dan Bangunan dan (PBB)
bertambah dengan 150.016.000.000,00

0210 Penerimaan Bea Masuk
berkurang dengan 332.198.000.000,00

0220 Penerimaan Cukai bertambah dengan 370.881.000.000,00

0230 Penerimaan Pajak Ekspor/pungutan
ekspor bertambah dengan 25.391.000.000,00

0240 Bea Meterai berkurang dengan 80.490.000.000,00

0250 Bea lelang berkurang dengan 22.000.000.000,00

Huruf b

PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI
DAN GAS ALAM bertambah dengan

20.236.700.000.000,00

0310 Penerimaan minyak bumi dan
gas alam bertambah dengan 20.485.900.000.000,00

0320 Penerimaan laba bersih minyak
(LBM) berkurang dengan 249.200.000.000,00

Huruf c

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
bertambah dengan

534.700.000.000,00

0410 Penerimaan pendidikan
bertambah dengan 19.038.600.000,00

0411 Uang pendidikan
bertambah dengan

18.959.900.000,00

0412 Uang ujian masuk, kenaikan

	tingkat, dan akhir pendidikan bertambah dengan	13.800.000,00
0413	Uang ujian untuk menjalankan praktek bertambah dengan	2.700.000,00
0414	Penerimaan pendidikan lainnya bertambah dengan	62.200.000,00
0480	Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan	23.048.100.000,00
0481	Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan	23.048.100.000,00
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan bertambah dengan	493.500.000,00
0511	Penjualan hasil pertanian, *10487 perkebunan bertambah dengan	72.100.000,00
0512	Penjualan hasil perternakan berkurang dengan	548.100.000,00
0513	Penjualan hasil perikanan bertambah dengan	13.900.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan bertambah dengan	240.000.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya bertambah dengan	5.100.000,00
0516	Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya bertambah dengan	24.600.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan	407.300.000,00
0519	Penjualan lainnya bertambah dengan	278.600.000,00
0520	Penjualan aset tetap bertambah dengan	460.900.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah bertambah dengan	39.300.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan	12.800.000,00
0523	Penjualan sewa beli bertambah dengan	386.900.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan bertambah dengan	21.900.000,00
0530	Penerimaan sewa bertambah dengan	118.500.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri berkurang dengan	98.000.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang berkurang dengan	800.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak bertambah dengan	160.200.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak	

	lainnya bertambah dengan	57.100.000,00
0540	Penerimaan jasa I bertambah dengan	41.462.200.000,00
0541	Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya bertambah dengan	1.737.600.000,00
0542	Penerimaan tempat hiburan/taman/museum bertambah dengan	115.000.000,00
0543	Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB berkurang dengan	19.146.600.000,00
0544	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah dengan	22.854.000.000,00
0545	Penerimaan hak dan perizinan bertambah dengan	32.915.300.000,00
*10488	0546 Penerimaan sensor/karantina, pengawasan, pemeriksaan bertambah dengan	392.200.000,00
0547	Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerja bertambah dengan	291.300.000,00
0548	Penerimaan jasa Kantor Urusan Agama bertambah dengan	333.400.000,00
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan	1.970.000.000,00
0550	Penerimaan Jasa II bertambah dengan	56.437.300.000,00
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) berkurang dengan	7.006.500.000,00
0552	Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda bertambah dengan	62.901.100.000,00
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin berkurang dengan	760.600.000,00
0554	Penerimaan jasa Kantor Catatan Sipil berkurang dengan	4.345.600.000,00
0555	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan	35.000.000,00
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan bertambah dengan	125.000.000,00
0557	Pendapatan bea lelang bertambah dengan	1.915.200.000,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara berkurang dengan	10.999.900.000,00
0559	Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan	14.573.600.000,00

0560	Penerimaan rutin dari luar negeri bertambah dengan	3.860.300.000,00
0561	Bea visa dan paspor berkurang dengan	1.995.000.000,00
0562	Bea konsuler berkurang dengan	2.367.100.000,00
0565	Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan bertambah dengan	57.000.000,00
0569	Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri bertambah dengan	8.165.400.000,00
0580	Penerimaan Penjualan, Sewa dan Jasa Swadana bertambah dengan	75.731.100.000,00
0581	Penerimaan penjualan swadana bertambah dengan	539.500.000,00
0582	Penerimaan sewa swadana *10489 bertambah dengan	900.000,00
0583	Penerimaan jasa swadana bertambah dengan	75.190.700.000,00
0610	Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan bertambah dengan	27.408.900.000,00
0611	Legilisasi tanda tangan bertambah dengan	1.600.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah bertambah dengan	200.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan bertambah dengan	3.186.800.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya bertambah dengan	13.600.000.000,00
0615	Ongkos perkara bertambah dengan	1.974.100.000,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya bertambah dengan	8.646.200.000,00
0710	Penerimaan dari investasi bertambah dengan	128.193.300.000,00
0711	Bagian laba dari BUMN bertambah dengan	128.193.300.000,00
0810	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Berjalan bertambah dengan	22.607.500.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan	2.028.900.000,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	3.030.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan	60.000.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja	

	rutin lainnya bertambah dengan	16.089.400.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	369.500.000,00 1.285.400.000,00
0816	Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh) bertambah dengan	113.800.000,00
0820	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran lalu bertambah dengan	13.834.700.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat berkurang dengan	368.800.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	12.739.000.000,00
0823	Penerimaan kembali belanja *10490 pensiun bertambah dengan	
1.376.900.000,00		
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan	44.200.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	33.900.000,00
0826	Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh) bertambah dengan	9.500.000,00
0880	Penerimaan Lain-lain Swadana bertambah dengan	9.713.800.000,00
0881	Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan	9.713.800.000,00
0890	Penerimaan Lain-lain bertambah dengan	112.291.300.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji bertambah dengan	7.500.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan bertambah dengan	47.900.000,00
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara bertambah dengan	56.400.000,00
0894	Penerimaan kembali berhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS-DO berdasarkan SPM nihil KPKN bertambah dengan	106.000.000.000,00
0899	Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan	6.179.500.000,00

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

***10491** Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

(dalam rupiah)

PENGELUARAN RUTIN	
bertambah dengan	22.447.432.000.000,00
01 SEKTOR INDUSTRI	
berkurang dengan	3.739.033.000,00
01.1 Subsektor Industri	
berkurang dengan	3.739.033.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN	

	KEHUTANAN bertambah dengan	14.242.557.000,00
	02.1 Subsektor Pertanian berkurang dengan	6.957.443.000,00
	02.2 Subsektor Kehutanan bertambah dengan	21.200.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	4.120.484.000,00
	03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan	2.189.874.000,00
	03.2 Subsektor Irigasi berkurang dengan	1.930.610.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	5.346.018.000,00
	04.1 Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan	5.346.018.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, *10492 KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	24.632.435.652.000,00
	05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan	6.579.037.000,00
	05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan	4.616.232.000,00
	05.4 Subsektor Keuangan bertambah dengan	24.648.165.130.000,00
	05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan	4.534.209.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	8.224.544.000,00
	06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan	3.363.092.000,00
	06.2 Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan	2.685.446.000,00
	06.3 Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan	99.388.000,00
	06.4 Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan	1.237.177.000,00
	06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan	839.441.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	767.111.000,00
	07.1 Subsektor Pertambangan	

	berkurang dengan	237.956.000,00
07.2	Subsektor Energi berkurang dengan	529.155.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	4.697.771.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata berkurang dengan	713.789.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi bertambah dengan	5.411.560.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	1.667.970.898.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan	1.663.632.000.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan	4.338.898.000,00
*10493	10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	1.525.300.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan	930.775.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	594.525.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	179.415.040.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan berkurang dengan	147.281.178.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan	20.774.351.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan	10.260.485.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga berkurang dengan	1.099.026.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	32.534.662.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan	32.534.662.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,	

	KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	7.953.841.000,00
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan	772.083.000,00
	13.2 Subsektor Kesehatan bertambah dengan	8.725.924.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	2.095.996.000,00
	14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan	1.357.095.000,00
	14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	738.901.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	87.222.259.000,00
	15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama berkurang dengan	7.267.478.000,00
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan	79.954.781.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN *10494 TEKNOLOGI berkurang dengan	13.730.778.000,00
	16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	10.022.814.000,00
	16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	489.754.000,00
	16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	221.418.000,00
	16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan	2.996.792.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	44.575.659.000,00
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	36.185.507.000,00
	17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum berkurang dengan	8.390.152.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	505.770.073.000,00
	18.1 Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan	487.738.270.000,00
	18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan	18.031.803.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR	

	NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan	660.390.694.000,00
19.1	Subsektor Politik berkurang dengan	5.305.087.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri bertambah dengan	687.765.141.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan	22.069.360.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan	315.250.660.000,00
20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkurang dengan	268.913.426.000,00
20.3	Subsektor Pendukung berkurang dengan	46.337.234.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

*10495	PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH	(dalam rupiah)
	berkurang dengan	2.780.574.000.000,00
01	SEKTOR INDUSTRI	
	bertambah dengan	306.201.000.000,00
01.1	Subsektor Industri	
	bertambah dengan	306.201.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	
	bertambah dengan	515.597.000.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	
	bertambah dengan	519.354.000.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	
	berkurang dengan	3.757.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	479.236.000.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan	92.693.000.000,00
03.2	Subsektor Irigasi berkurang dengan	386.543.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	57.182.000.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan	57.182.000.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN	

	KOPERASI berkurang dengan	34.271.000.000,00
	05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri bertambah dengan	3.411.000.000,00
	05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan	1.810.000.000,00
	05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional berkurang dengan	1.200.000.000,00
	05.4 Subsektor Keuangan berkurang dengan	1.564.000.000,00
	05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha kecil berkurang dengan	33.108.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	712.172.000.000,00
	06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan	475.725.000.000,00
	06.2 Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan	102.683.000.000,00
	06.3 Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan	70.987.000.000,00
	06.4 Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan	55.031.000.000,00
	06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan *10496 Penyelamatan (SAR) berkurang dengan	7.746.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	302.383.000.000,00
	07.1 Subsektor Pertambangan berkurang dengan	29.345.000.000,00
	07.2 Subsektor Energi berkurang dengan	273.038.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	31.605.000.000,00
	08.1 Subsektor Pariwisata berkurang dengan	18.050.000.000,00
	08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan	13.555.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	416.523.000.000,00
	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan	74.800.000.000,00
	09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan	491.323.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN	

	TATA RUANG berkurang dengan	76.730.000.000,00
	10.1 Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan	54.195.000.000,00
	10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	22.535.000.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	489.860.000.000,00
	11.1 Subsektor Pendidikan berkurang dengan	393.520.000.000,00
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan	46.231.000.000,00
	11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan	27.565.000.000,00
	11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga berkurang dengan	22.544.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	151.554.000.000,00
	12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	
	*10497 berkurang dengan	151.554.000.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	164.929.000.000,00
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial bertambah dengan	28.421.000.000,00
	13.2 Subsektor Kesehatan berkurang dengan	116.824.000.000,00
	13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja berkurang dengan	76.526.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	132.199.000.000,00
	14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan	125.345.000.000,00
	14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	6.854.000.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	64.442.000.000,00
	15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama berkurang dengan	11.458.000.000,00
	15.2 Subsektor Pembinaan	

	Pendidikan Agama berkurang dengan	52.984.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	153.125.000.000,00
	16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan	21.607.000.000,00
	16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	17.193.000.000,00
	16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	31.417.000.000,00
	16.4 Subsektor kelautan berkurang dengan	19.141.000.000,00
	16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	11.416.000.000,00
	16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan	52.351.000.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	58.323.000.000,00
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	4.773.000.000,00
	17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur *10498 Hukum berkurang dengan	15.520.000.000,00
	17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum berkurang dengan	38.030.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	164.646.000.000,00
	18.1 Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan	158.745.000.000,00
	18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan	5.901.000.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	48.842.000.000,00
	19.1 Subsektor Politik berkurang dengan	6.000.000.000,00
	19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri berkurang dengan	2.199.000.000,00
	19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan	40.643.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan	64.350.000.000,00

20.2 Subsektor ABRI berkurang dengan	54.350.000.000,00
20.3 Subsektor Pendukung berkurang dengan	10.000.000.000,00

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

(dalam rupiah)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG
DIBIYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN
KREDIT EKSPOR

bertambah dengan	10.791.000.000.000,00
01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	391.077.000.000,00
01.1 Subsektor Industri bertambah dengan	391.077.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	528.973.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian bertambah dengan	500.167.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan bertambah dengan	28.806.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN *10499 bertambah dengan	971.014.000.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air bertambah dengan	544.083.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi bertambah dengan	426.931.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	61.819.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja bertambah dengan	61.819.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	243.048.000.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri bertambah dengan	21.944.000.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri bertambah dengan	67.927.000.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional bertambah dengan	11.489.000.000,00

05.4	Subsektor Keuangan bertambah dengan	83.399.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil bertambah dengan	58.289.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan	3.224.441.000.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan bertambah dengan	1.287.717.000.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat bertambah dengan	1.100.119.000.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan	489.878.000.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara bertambah dengan	320.097.000.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) bertambah dengan	26.630.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	2.393.048.000.000,00
07.2	Subsektor Energi *10500 bertambah dengan	2.393.048.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	705.882.000.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi bertambah dengan	705.882.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	169.994.000.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan	167.812.000.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan bertambah dengan	2.182.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan	42.476.000.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup bertambah dengan	26.249.000.000,00

	10.2 Subsektor Tata Ruang bertambah dengan	16.227.000.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan	488.160.000.000,00
	11.1 Subsektor Pendidikan bertambah dengan	472.765.000.000,00
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan bertambah dengan	15.395.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA bertambah dengan	6.424.000.000,00
	12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana bertambah dengan	6.424.000.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	215.233.000.000,00
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial bertambah dengan	40.780.000.000,00
	13.2 Subsektor Kesehatan bertambah dengan	171.490.000.000,00
	*10501 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja bertambah dengan	2.963.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan	905.499.000.000,00
	14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman bertambah dengan	888.113.000.000,00
	14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan bertambah dengan	17.386.000.000,00
15	SEKTOR AGAMA bertambah dengan	15.133.000.000,00
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan	15.133.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan	88.333.000.000,00
	16.1 Subsektor Teknik Produksi	

	dan Teknologi	
	bertambah dengan	60.950.000.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	
	bertambah dengan	114.000.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Iptek	
	bertambah dengan	19.774.000.000,00
16.4	Subsektor Kelautan	
	bertambah dengan	6.094.000.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	
	bertambah dengan	1.087.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	
	bertambah dengan	314.000.000,00
17	SEKTOR HUKUM	
	bertambah dengan	274.000.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	
	bertambah dengan	274.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	bertambah dengan	49.537.000.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	
	bertambah dengan	48.651.000.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	
	bertambah dengan	886.000.000,00
*10502	19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
	bertambah dengan	31.578.000.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	
	bertambah dengan	31.578.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	bertambah dengan	259.057.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI	
	bertambah dengan	259.057.000.000,00

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672) maupun Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3749

